ABSTRAK

Ahmad Maulana, *Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Banjarbaru*. Skripsi, Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Implementasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Persidangan Elektronik.

Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan wadah atau tempat dimana masyarakat yang beragama islam dan bertempat tinggal di Banjarbaru mengajukan permohonan untuk mendapat keadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan telah ditetapkan dari tahun 2019-2022. Selama itu dimungkinkan ada beberapa hasil yang di upayakan sesuai dengan dokta PERMA dan mungkin juga ada beberapa kendalanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru setelah diterapkan PERMA nya dan kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris, data penelitian yang digunakan adalah data primer kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan PERMA. Masalah yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, klasifikasi, deskripsi dan matriks. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yaitu Persidangan Elektronik.

Ketentuan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah terimplementasi dengan baik pada Pengadilan Agama Banjarbaru meskipun dalam beberapa hal belum optimal dan pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk secara e-litigasi belum mencapai angka di atas 50%. Terdapat beberapa faktor kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru, diantaranya: 1) Faktor budaya setempat, 2) Faktor masyarakat terhadap kurangnya pengetahuan teknologi, 3) Faktor pihak luar yang kurang mendukung, dan 4) Faktor kurangnya ketegasan dari penegak hukum.